

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indikator-indikator yang terdapat dalam teori *Developmental Elite* yang di jelaskan oleh Adrian Leftwich dalam pengaplikasian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap strategi Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor mobil oleh pemerintah Vietnam pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. *The Developmental Elite*

Dalam *Developmental Elite* ini menjelaskan bagaimana Presiden Joko Widodo yang memiliki hubungan yang erat dengan aktor-aktor lain bersama-sama untuk mempercepat pertumbuhan terhadap industri otomotif melalui intervensi yang diberikan, pemerintah yang memiliki kewenangan yang sangat berpengaruh bagi *Private Sector* juga dapat menyesuaikan kebijakan dan regulasi untuk dapat memajukan perusahaan dan meningkatkan daya saing terlebih lagi adanya hubungan yang kuat terhadap menteri-menterinya yang pernah menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif. Adanya keterkaitan antara Presiden Joko Widodo dengan menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, dan GAIKINDO

memberikan hasil yang optimal untuk menyelesaikan masalah terkait ekspor mobil ke negara Vietnam.

2. *Relative Autonomy Of The Developmental State*

Kewenangan pemerintah yang memiliki batasan dan tidak dapat memaksa secara langsung hanya bisa memberikan arahan melalui intensif terhadap kebijakan yang dikeluarkan serta peraturan seperti pajak *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, *Super Deductible Tax*, PPnBM untuk menjaga stabilitas ekspor-impor, dan penggunaan TKDN. Selain itu dalam kewenangan pemerintah terhadap perdagangan internasional juga memiliki keterbatasan sehingga melakukan upaya dalam menjaga industri otomotifnya dengan cara mengikuti aturan dalam perjanjian internasional seperti WTO, melakukan penyesuaian kebutuhan administratif domestik dengan standar internasional, dan diplomasi perdagangan dengan cara melakukan pendekatan persuasif yaitu mengirimkan delegasi untuk dapat melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam guna menjaga stabilitas perekonomian dan industri otomotif nasional, serta hubungan antar sesama negara.

3. *The Economic Bureaucracy: Power, Competence, Insulation and Penetration*

Lembaga yang terhubung dengan pemerintah memiliki tugas dalam mengontrol, memberi strategi, dan mengeluarkan kebijakan terhadap industri otomotif serta melancarkan kembali ekspor mobil ke negara Vietnam, seperti kementerian perindustrian yang mampu mengembangkan industri komponen dalam negeri, peningkatan SDM, riset & teknologi, dan menjadi koordinator bagi

menteri-menteri lainnya dalam menjaga industri otomotif terkait persyaratan dan sertifikasi yang harus sesuai dengan VTA Vietnam sehingga ekspor otomotif berjalan normal kembali, kementerian perdagangan berperan dalam memposisikan Indonesia untuk bernegosiasi, diplomasi, dalam forum regional, maupun bilateral, dimana artinya hal ini mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sosial, dan memberikan konsultasi teknis terhadap pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses regulasi terkait aktivitas ekspor mobil Indonesia yang sempat mengalami kendala terkait perizinan dan segera di pulihkan, kementerian perhubungan melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam dengan cara menjelaskan bagaimana proses uji emisi dan teknologi melalui data-data untuk uji tipe kendaraan yang ada di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi internasional dalam keselamatan dan emisi, GAIKINDO yang merupakan pihak swasta membantu pemerintah dengan menentukan arah kebijakan dan penjualan dalam domestik maupun luar negeri, dan kementerian luar negeri yang merupakan mediator untuk berdiplomasi dan negosiasi terhadap pemerintah Vietnam sehingga memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua negara terkait regulasi *Decree no.116* dan *Circular no.3*.

4. *Developmental States and Civil Society*

Perumusan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat karna dianggap lemah menggambarkan bahwa kebijakan yang di keluarkan pemerintah lebih mengarah kepada kebutuhan industri otomotif dan perusahaan, meskipun hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya tidak diperhatikan dalam dunia

industri otomotif, GAIKINDO berperan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dan melakukan distribusi, promosi, maupun pengembangan industri otomotif. GAIKINDO sangat berperan aktif bagi pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang diperlukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan maupun program yang sesuai untuk kedepannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penjualan dan penyelenggaraan acara seperti GIIAS sehingga masyarakat menerima hasil kemajuan teknologi dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Birokrasi yang berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah tidak melibatkan *civil society* karena posisi yang sangat sempit dan lemah untuk terlibat dalam menentukan arah. Meskipun hadirnya GAIKINDO di Indonesia membantu masyarakat dalam memenuhi pasar tetapi yang paling dominan di sini adalah birokrasinya yang hanya mementingkan kepentingan dari perusahaan industri otomotif sehingga masyarakat di sini tidak diperhatikan.

5. *The Effective Management of Non-State Economic Interests*

Untuk dapat mendorong industri otomotif, maka pemerintah membuat kebijakan yang memaksa perusahaan lokal. Pemaksaan tersebut membuat perusahaan mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, seperti peningkatan teknologi, SDM, maupun penelitian dan peningkatan kualitas standar yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk mengikuti kebijakan terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* dalam menyesuaikan, sertifikasi, dan administrasi. Meskipun pemerintah melakukan paksaan terhadap

pihak swasta, namun hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Industri otomotif.

6. *Developmental State: Civil Rights, Performance and Legitimacy*

Kebijakan memaksa yang dijalankan Presiden Joko Widodo dalam membangun industri otomotifnya sangat jelas berdampak terhadap pihak swasta dan hanya bisa menerima keputusan dari pemerintah melalui tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut memberikan biaya tambahan bagi perusahaan untuk mengembalikan ekspor mobil ke negara Vietnam dalam memenuhi syarat teknis terkait pengujian dan sertifikasi. Langkah yang optimal dalam mengharmonisasi aturan Vietnam terhadap Vehicle Type Approval (VTA) justru memberikan performa yang positif bagi peningkatan produksi mobil di Indonesia. Namun kebijakan yang tidak searah dengan perusahaan lokal tersebut justru mampu dibuktikan oleh pemerintah melalui performa yang memberikan legitimasi yang terus berjalan hingga saat ini.

Dengan demikian, adanya hubungan yang terjalin antara pemerintah beserta elit birokrasinya seperti kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan, GAIKINDO, dan kementerian luar negeri, dalam melakukan kerja sama di bidang Industri otomotif, memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan ekspor mobil ke negara Vietnam. Selain itu dalam kerja sama yang terjalin memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mendorong industri otomotifnya terus berkembang seiring perkembangan zaman. kebijakan yang di keluarkan pemerintah sangat memerlukan kerja sama dari elit-elit yang

berada dalam industri otomotif ini sehingga mampu membantu Indonesia dalam menyelamatkan ekonomi yang menurun akibat adanya *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018*.

Pemerintah yang mampu melihat prospek menjanjikan dengan menjaga hubungan dengan Vietnam justru hanya melakukan diplomasi terkait masalah yang di hadapi terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* tanpa membalas dengan menghentikan impor ke negara tersebut. Sehingga melalui hasil-hasil yang diberikan pemerintah melalui kebijakan terhadap industri otomotifnya mampu memberikan legitimasi yang terus meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo.

